

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di Tahun 2018.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dan sebagai laporan tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018.

Painan, Desember 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku PPID Utama



IUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700609 199703 1 00

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Kebijakan Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan	1
3. PPID Kabupaten, Perangkat Daerah dan Nagari	3
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
2. Sumber Daya Manusia	9
3. Anggaran	9
4. Daftar Informasi Publik	10
5. Permohonan Informasi Publik	11
6. Sengketa Informasi Publik	13
BAB III REALISASI ANGGARAN	14
BAB IV KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT	15
1. Kegiatan PPID Kabupaten Pesisir Selatan	15
2. Kendala	29
3. Rencana Tindak Lanjut	30
BAB V PENUTUP	31
LAMPIRAN	32
Dokumentasi	33

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 20 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/84/Kpts/BPT-PS/ 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari juga membentuk PPID Pembantu pada unit kerjanya masing-masing ditetapkan dengan surat keputusan Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Wali Nagari.

Sebagai pedoman PPID dalam pelayanan informasi, juga menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta Pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2. Kebijakan Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

***“ Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju
Kabupaten Pesisir Selatan Maju ”***

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai akhir Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan berbagai Peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/84/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/240/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/241/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/322/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/323/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- g. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/503/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Keterbukaan Informasi

Publik Bagi Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

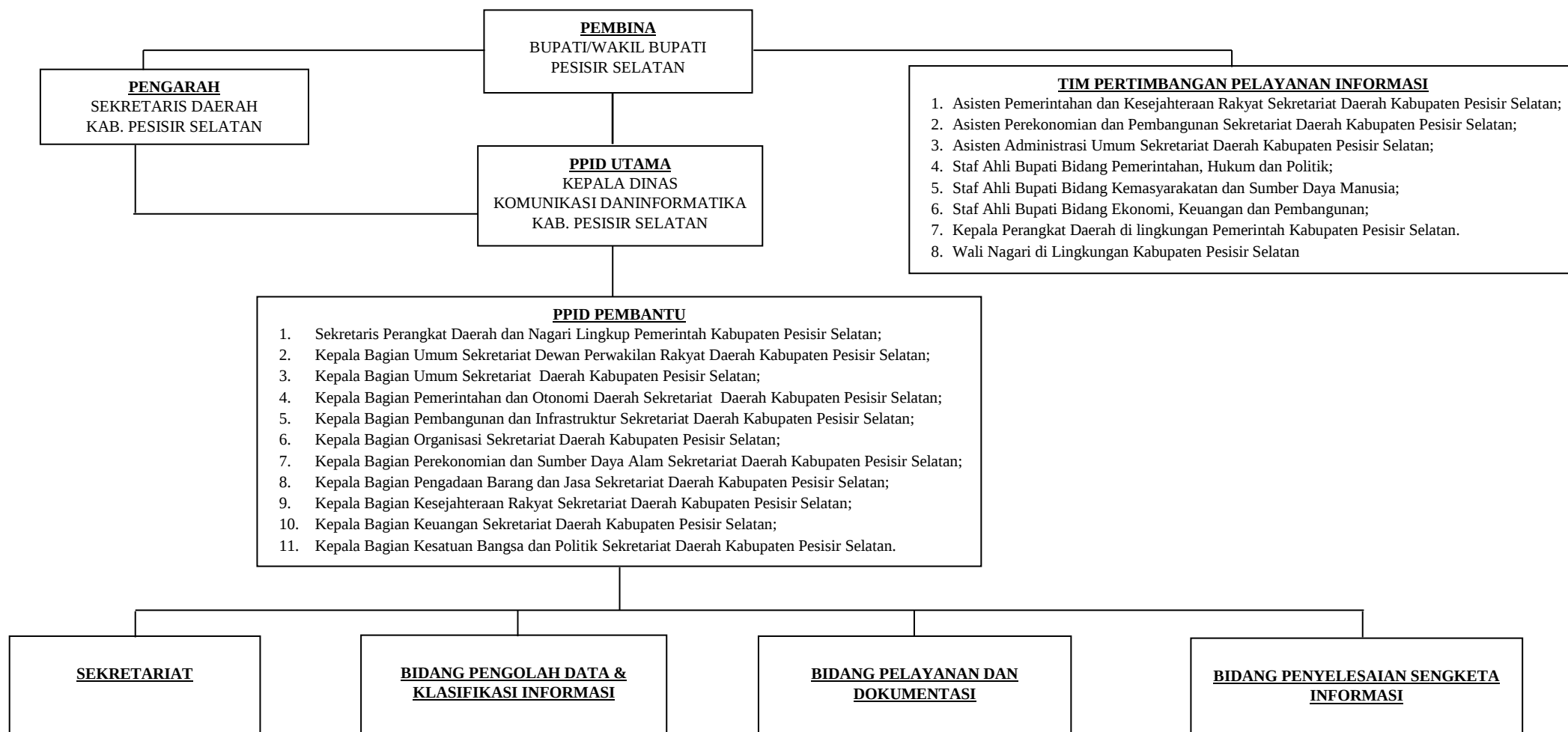
- h. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/504/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Tiga Besar Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten, Perangkat Daerah dan Nagari.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi. Untuk PPID Kabupaten Pesisir Selatan menangani informasi dan dokumentai dengan Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Utama (Kepala Dinas Komunikaasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan).

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018



Organisasi PPID Perangkat Daerah dijabat oleh Sekretaris, sedangkan untuk Sekreatriat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokoler, untuk Sekretariat DPRD oleh Kepala Bagian Tata Usaha, untuk Kecamatan dijabat oleh Sekretaris Camat dan Pemerintahan Nagari dijabat oleh Sekretaris Nagari. Masing - masing atasan langsung PPID adalah Kepala Dinas/Badan, Camat untuk Perangkat Daerah dan Wali Nagari untuk Pemerintahan Nagari. Struktur organisasi PPID Kabupaten, PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari meliputi Atasan PPID, PPID, Sekretaris, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi dan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, setiap Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi dapat memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi

Bupati Pesisir Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, melalui website, whatsapp, sms langsung dan radio.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Setiap permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur layanan informasi PPID dalam melakukan prosedur layanan informasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

A. Ruangank Desk Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan PPID Kabupaten Pesisir Selatan bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan alamat : Jln.H.Agus Salim Painan (Lantai 2 Gedung BPKD) yang dilengkapi dengan sarana dan prasaranan sebagai berikut :

1. 1 set kursi tamu
2. 1 meja layanan informasi
3. 1 unit Personal Komputer (untuk petugas layanan)
4. 1 unit Personal Komputer (untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi)
5. 1 unit Printer
6. 1 unit telepon/fax
7. 1 unit AC
8. 1 unit Televisi
9. 1 lemari arsip
10. Daftar Informasi Publik
11. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik
 - b. Tanda Bukti Penerimaan informasi publik
 - c. Tanda Bukti penyerahan informasi publik
 - d. Formulir Pengajuan Keberatan

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan, struktur PPID, poster jam layanan dan jenis layanan publik yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan dengan 2 (dua) orang petugas desk layanan informasi. Ruang PPID juga dilengkapi dengan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT.



B. Penyediaan Akses Informasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, tepat, mudah sederhana, permohonan informasi dapat melakukan permohonan informasi melalui :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan, alamat : Jln. H. Agus Salim Painan (Lantai II Gedung BPKD).
2. Melalui Telepon/Fax (0756) 231 2227
3. Mengisi formulir dan mengirimkan email ke ppid@pesisirselatankab.go.id
4. Melalui website PPID Utama <http://ppid.pesisirselatankab.go.id> yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan website perangkat daerah. Penyediaan akses informasi melalui website bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi sesama Perangkat Daerah dan Nagari. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Jam Pelayanan Informasi publik, sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Wib
Istirahat : 12.00 – 13.00 Wib
- Jumat : 08.00 – 16.000 Wib
Istirahat : 12.00 – 14.00 Wib

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu elemen penting dari pelayanan informasi publik adalah tersedianya sumber daya manusia yang akan mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Secara operasional PPID Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari. (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan) yaitu :

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan selaku Pembina
2. Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan PPID
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama dan Sekretariat PPID Utama)
4. Asisten pada Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari selaku Tim Pertimbangan
5. Sekretaris Perangkat Daerah dan Nagari selaku PPID Pembantu

3. ANGGARAN PPID

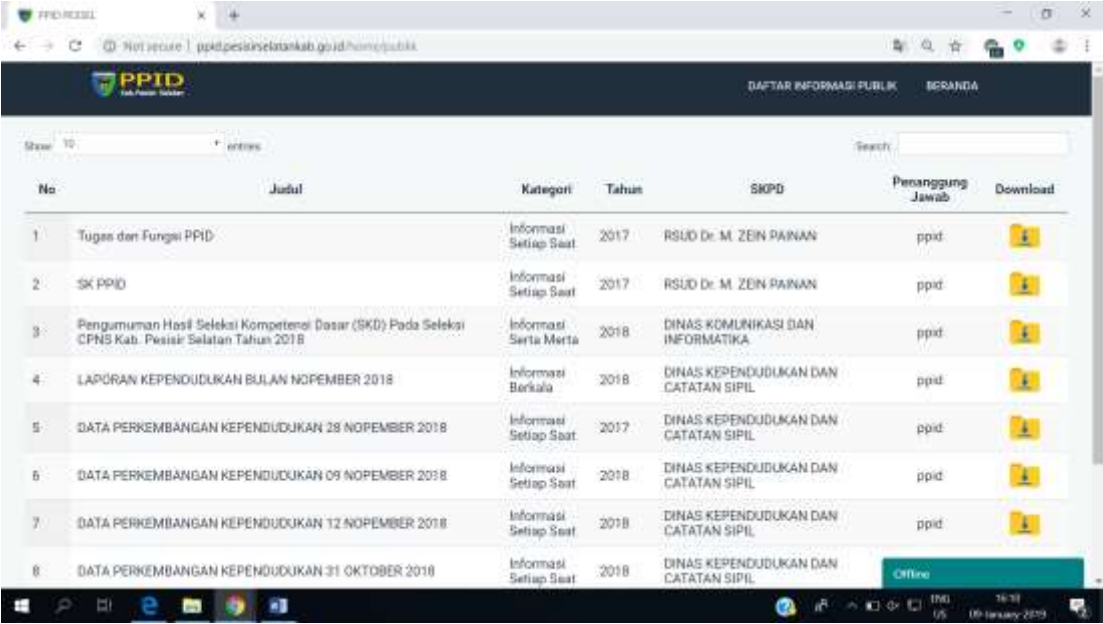
Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya telah dianggarkan, penganggaran pada Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, sebagai berikut :

Program Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi

- Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik, sebesar Rp. 195.253.500,- setelah PAPBD Rp. 203.831.000,-

4. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahun semua informasi tentang Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pemutakhiran data dan mengupload daftar informasi publik (DIP) di website masing-masing perangkat daerah dan nagari. Sampai pada akhir 2018, jumlah DIP Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 3.800 dokumen.



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://ppid.pesisirselatankab.go.id/home/publik>. The page title is "PPID Kabupaten Pesisir Selatan" and the header includes "DAFTAR INFORMASI PUBLIK" and "BERANDA". Below the header, there is a search bar and a table of public information documents. The table has columns for No, Judul, Kategori, Tahun, SKPD, Penanggung Jawab, and Download. The table lists 8 documents, including "Tugas dan Fungsi PPID", "SK PPID", "Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pada Seleksi CPNS Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018", "LAPORAN KEPENDUDUKAN BULAN NOPEMBER 2018", "DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 28 NOPEMBER 2018", "DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 09 NOPEMBER 2018", "DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 12 NOPEMBER 2018", and "DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 31 OKTOBER 2018". Each document has a download icon in the Download column.

No	Judul	Kategori	Tahun	SKPD	Penanggung Jawab	Download
1	Tugas dan Fungsi PPID	Informasi Setiap Saat	2017	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	ppid	
2	SK PPID	Informasi Setiap Saat	2017	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	ppid	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pada Seleksi CPNS Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018	Informasi Serta Merta	2018	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ppid	
4	LAPORAN KEPENDUDUKAN BULAN NOPEMBER 2018	Informasi Berkala	2018	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ppid	
5	DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 28 NOPEMBER 2018	Informasi Setiap Saat	2017	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ppid	
6	DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 09 NOPEMBER 2018	Informasi Setiap Saat	2018	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ppid	
7	DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 12 NOPEMBER 2018	Informasi Setiap Saat	2018	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ppid	
8	DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 31 OKTOBER 2018	Informasi Setiap Saat	2018	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ppid	

5. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA DESK LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NO.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Bentuk Informasi Yang diminta		Jenis Permohonan		Keputusan
							Softcopy	Hardcopy	Melihat/ mengetahui	Meminta Salinan	
1	10-01-2018	KPK (Komunitas Pemantau Korupsi) Nusantara	Painan	081363711164	1. Jumlah Dana BOS yang diterima (Tahun 2013 s/d 2017) 2. Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) (Tahun 2013 s/d 2017) 3. Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang dibeli (Tahun 2013 s/d 2017) 4. Kwitansi Belanja Barang (Tahun 2013 s/d 2017) 5. Dana Pemeliharaan Sekolah (Tahun 2013 s/d 2017)	Sebagai Petunjuk awal bagi Tim LSM KPK Nusantara DPC Pessel untuk menegakkan supermasi hukum di NKRI ini	√	√	-	√	Diberikan salinan sesuai dengan surat keputusan
2	15-03-2018	Forum Kabupaten Sehat	Painan	-	Profil/Laporan Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 2018	Bahan untuk sekretariat Kabupaten Sehat di Kabupaten Pesisir Selatan	√	√	-	√	Diberikan salinan sesuai dengan surat keputusan

**LAPORAN AKSES PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

NO.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Email	Jenis Permohonan		Keputusan
								Melihat/ mengetahui	Meminta Salinan	
1	18-01-2018	Rasra Delwangga	Ranah Bayang, Kec. IV Nagari Bayu	085214939309	Data Produsen Tahu Tempe di Kabupaten Pesisir Selatan	Data untuk menyelesaikan penelitian tentang Analisa Usaha Tahu dan Tempe	rasradelwangga@gmail.com	√	√	Terpenuhi
2	20-02-2018	Norfadilla	Pasar Gompong, Kambang Barat, Kec. Lengayang	085356232996	Rekapitulasi Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat di Semua SKPD dan Kecamatan di Pesisir Selatan Tahun 2017	Sebagai bahan skripsi tentang analisis kewajaran kegiatan penyediaan surat menyurat dengan pendekatan analisis standar belanja di skpd dan kecamatan di kabupaten pesisir selatan tahun 2017	norfadillajamalus68@gmail.com	√	√	Terpenuhi
3	26-02-2018	Anggun Aprilia Savitri	Padang Marapalam	081270711286	Informasi beasiswa dari Baznas	Untuk mengajukan proposal beasiswa	anggunapriliasavitri1@gmail.com	√	√	Terpenuhi
4	24-04-2018	Darlian Hardi	Jln. Muaro Pulau Karam Ampang Pulai No. 61	082288211302	Informasi tentang lowongan pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Sebagai acuan untuk mengajukan permohonan kerja	darlianhardi27@gmail.com	√	√	Terpenuhi
5	26-04-2018	Maulan Halilah	Jl. Patengganan No.24 J Air Tawar Kota Padang	082284745345	Data Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 s/d 2017	Sebagai bahan Penelitian	maulanihalila29@gmail.com	√	√	Terpenuhi (dari Tahun 2016-2017)

6. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2018 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permohonan yang masuk ke PPID Kabupaten Pesisir Selatan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

NO.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik Yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan	Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Tanggapan Permohon Informasi

BAB III

REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ini dianggarkan sebesar Rp. 195.253.500,- dan setelah PAPBD sebesar Rp. 203.831.000,- dengan realisasi fisik tercapai 100%, dan anggaran terealisasi Rp. 188.298.131,- atau sebesar 92,38 %. Dari anggaran yang direncanakan tersebut tersisa sebesar Rp. 15.532.869,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
		203,831,000	188,298,131	15,532,869	92.38
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,000,000	6,000,000	-	100
2	Belanja Alat Tulis Kantor	9,566,000	7,866,000	1,700,000	82.23
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360,000	360,000	-	100.00
4	Belanja Bahan Material event tertentu/Perlombaan	2,000,000	1,200,000	800,000	60.00
5	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,500,000	1,460,000	40,000	97.33
6	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	18,760,000	14,660,000	4,100,000	78.14
7	Belanja Akomodasi	4,500,000	4,500,000	-	100.00
8	Belanja Dekorasi	1,500,000	1,485,000	15,000	99.00
9	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8,800,000	8,765,800	34,200	99.61
10	Belanja Cetak	3,290,000	920,000	2,370,000	27.96
11	Belanja Penggandaan	5,000,000	4,940,000	60,000	98.80
12	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000	3,000,000	1,500,000	66.67
13	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,400,000	5,394,000	6,000	99.89
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,455,000	11,412,500	42,500	99.63
15	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	6,750,000	4,990,000	1,760,000	73.93
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,925,000	23,780,000	145,000	99.39
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	19,425,000	19,375,000	50,000	99.74
18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	11,500,000	11,639,831	139,831	101.22
19	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	0.00
20	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	47,100,000	44,050,000	3,050,000	93.52
21	Uang Untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	12,500,000	12,500,000	-	100.00

BAB IV

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

I. KEGIATAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah :

- a. Melakukan Penguatan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan narasumber dari Komisi Informasi dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.

Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap PPID Pembantu tentang tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam layanan informasi publik.

- b. Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas bagi Kepala Perangkat Daerah dan 20 Nagari sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 dengan diwakili secara simbolis oleh Dinas Sosial, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Nagari Painan, Nagari Painan Timur, Nagari Sungai Gayo Lumpo, Nagari Lunang Barat dan Nagari Lunang Tiga. Pakta integritas ditandatangani oleh masing-masing perwakilan dan Bupati Pesisir Selatan serta disaksikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

- c. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi PPID Pembantu (Sekretaris Perangkat Daerah) dan Admin PPID. Sosialisasi ini dilaksanakan di Hannah Hotel Syariah Painan dengan narasumber sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Ir.Erizon M.T)
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Syamsu Rizal, SE)
3. Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Sondri, S.Ag)
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (Indra Sukma, S.Kom)
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Junaidi, S.Kom)

- d. Rapat Koordinasi PPID tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018

bertempat di Operation Room Kantor Bupati. Dari hasil evaluasi tim PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan masih banyak perangkat daerah yang tidak mengunggah/upload dokumen informasi publiknya di website masing-masing. Sehingga jumlah DIP PPID Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat sedikit sekali. Untuk itu, diperlukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi Perangkat Daerah yang belum mengunggah atau belum melengkapi daftar informasi publiknya.

- e. Mengumumkan APBD Perangkat Daerah dan Nagari melalui Baliho yang dipasang di depan kantor Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu bentuk transparansi yang dilaksanakan PPID Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan menampilkan seluruh APBD Perangkat Daerah dan Nagari sehingga masyarakat dapat langsung melihat dan mengetahuinya.
- f. Membentuk PPID Nagari untuk 30 Nagari dari 182 Nagari dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik sampe ke tingkat nagari melalui pembangunan Sistem Informasi Nagari.
- g. Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi Nagari untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi aparatur nagari dalam penyusunan daftar informasi nagari dan pelayanan informasi publik. Sosialisasi ini dilaksanakan pada ruang pertemuan Hannah Hotel Syariah Painan pada tanggal 27 November 2018. Dengan digagasnya Pembentukan PPID Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan sosialisasi ini sangat membantu aparatur nagari. Adapun yang menjadi narasumber dari sosialisasi ini adalah :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Junaidi, S.Kom)
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Nagari (Yefrizal, SH)
 - 3. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Arfitriati, S.Ag)
- h. Membentuk Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai media untuk berkomunikasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- i. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selatan melalui Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan mendorong percepatan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Berikut Rincian dari

Pelaksanaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Bagi Perangkat Daerah dan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

1. Latar Belakang Pemeringkatan PPID Pembantu

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik. Karenanya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik guna menilai kepatuhan PPID Pembantu di Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari dalam mengimplementasikan UU KIP tersebut.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana PPID di badan publik masing-masing, melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi di masing-masing Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

2. Maksud dan Tujuan Pemeringkatan PPID Pembantu

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik ke masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan keterbukaan informasi publik.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong percepatan penerapan UU KIP di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya bagi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai berikut:

- 45 Perangkat Daerah
- 30 Nagari (merupakan 2 nagari perwakilan dari masing-masing Kecamatan)

4. Metodologi

Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik ini menggunakan metode penyebaran kuesioner (***Self Assessment Questionnaire/SAQ***) ke seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kuesioner yang telah dikirim, memiliki bobot penilaian per indikator sebagai berikut :

- Indikator Pengembangan Website, bobot nilai 30%
- Indikator Mengumumkan Informasi Publik, bobot nilai 25%
- Indikator Menyediakan Informasi Publik, bobot nilai 20%
- Indikator Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik, bobot nilai 25%

Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ yang sudah dijawab oleh Badan Publik akan diverifikasi oleh tim penilai dan dilanjutkan dengan verifikasi website.

Instrumen yang digunakan dalam Pemeringkatan ini adalah Verifikasi SAQ (Self Assessment Questionnaire), Verifikasi Website dan Visitasi Badan Publik. Setiap instrumen dan tahapan ditetapkan bobot nilainya terlebih dahulu. Adapun bobot nilai untuk instrumen dan tahapan evaluasi ini adalah sebagai berikut :

- Verifikasi Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ dengan bobot kumulatif sebesar 30%
- Verifikasi Website dengan bobot kumulatif sebesar 30%
- Visitasi Badan Publik dengan bobot kumulatif sebesar 40%

5. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan tim penilai sebagai berikut :

Ketua : Ir. Erizon, M.T (Sekretaris Daerah)

Wakil Ketua : 1. Gunawan S.Sos M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra)

2. Rusdyanto, SH, M.Si (Asisten Pereko. dan Pembangunan)

Anggota : 1. Junaidi, S.Kom, ME (Kadis Kominfo)

2. Arfitriati, S.Ag (Komisioner Komisi Informasi Prov. Sumbar)

3. Adrian Tuswandi, SH (Anggota Komisi Informasi Prov. Sumbar)

4. Tiwi Utami, SH (Staf Sekretariat Komisi Informasi Prov. Sumbar)

6. Tahapan Pemeringkatan

Secara garis besar Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melalui tahapan sebagai berikut :

NO.	AGENDA	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengiriman Kuesioner/SAQ	20 - 21 November 2018
2.	Pengisian Kuesioner/SAQ	21 - 29 November 2108
3.	Pengembalian/Pengumpulan Kuesioner/SAQ	29 November 2018
4.	Penilaian SAQ dan Verifikasi Website	29 - 1 November 2018
5.	Visitasi Badan Publik	3 - 6 Desember 2018
6.	Pengelolaan Data Hasil Visitasi	5 - 6 Desember 2018
7.	Pelaporan Hasil Pemeringkatan ke Pimpinan	20 Desember 2018
8.	PENGUMUMAN HASIL PEMERINGKATAN	17 Desember 2018

Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari yang mengembalikan lembar isian / jawaban SAQ MONEV Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 kepada Tim Penilai Pemeringkatan sebagi berikut :

1. PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	DINAS PERHUBUNGAN
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4	RSUD M. ZEIN PAINAN
5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR
8	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
11	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
13	BADAN PENDAPATAN
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
16	KECAMATAN BAYANG UTARA
17	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
18	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2. NAGARI

NO	NAMA NAGARI
1	NAGARI LUNANG TIGA
2	NAGARI PAINAN
3	NAGARI LUNANG BARAT
4	NAGARI LALANG PANJANG
5	NAGARI SUNGAI TUNU
6	NAGARI KOTO VIII PELANGAI

Hasil dari pengembalian lembar isian/jawaban SAQ, ada beberapa Perangkat Dearah tidak menyertakan data dukung baik daam bentuk softcopy. Bahkan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mengembalikan Keusioner/SAQ dengan kondisi tidak diisi atau kosong. Untuk Nagari hanya 6 nagari yang mengembalikan isian/jawaban SAQ, 2 diantaranya hanya mengisi Data Banda Publik sedangkan pertanyaan kuesioner tidak diisi yaitu Nagari Sungai Tunu dan Nagari Koto VIII Pelangai.

HASIL PEMERINGKATAN

1. Hasil Verifikasi SAQ/Kuesioner Penilaian Mandiri

NO.	Nama Perangkat Daerah	Pengembalian Kuesioner/SAQ	Pengembangan Website	Mengumumkan Informasi Publik	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik	TOTAL NILAI	Keterangan
1	RSUD M. ZEIN PAINAN	10	30	19.25	14.58	15	88.83	Memiliki SK PPID
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10	30	13.22	15.25	20	88.47	Memiliki SK PPID
3	DINAS PARIWISATA	10	30	14.66	15.59	13.33	83.58	Memiliki SK PPID
4	DINAS PERHUBUNGAN	10	30	15.52	3.05	11.67	70.24	Tidak Memiliki SK PPID
5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10	25	16.09	3.05	11.67	65.81	Tidak Memiliki SK PPID
6	DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	10	25	12.64	4.41	13.33	65.38	Tidak Memiliki SK PPID
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	25	12.64	4.06	10	61.7	Tidak Memiliki SK PPID
8	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	10	20	8.33	6.44	16.67	61.44	Tidak Memiliki SK PPID
9	DINAS PERKIMTAN	10	25	12.36	3.05	5	55.41	Tidak Memiliki SK PPID
10	KECAMATAN BAYANG UTARA	10	20	7.76	5.08	10	52.84	Tidak Memiliki SK PPID
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10	20	10.66	2.03	10	52.69	Tidak Memiliki SK PPID
12	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	25	6.32	2.71	3.33	47.36	Tidak Memiliki SK PPID
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10	20	10.63	3.73	1.67	46.03	Memiliki SK PPID
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	25	4.31	3.39	1.67	44.37	Tidak Memiliki SK PPID
15	DINAS PERIKANAN	10	15	6.61	2.37	1.67	35.65	Tidak Memiliki SK PPID
16	DINAS PMPPTSP	10	15	4.31	1.36	3.33	34	Tidak Memiliki SK PPID
17	BADAN PENDAPATAN	10	10	5.4	0	5	30.4	Tidak Memiliki SK PPID
18	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & PERKEBUNAN	10	0	0	0	0	10	Tidak Memiliki SK PPID

**HASIL PENILAIAN LEMBAR ISIAN/JAWABAN SAQ
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
KATEGORI : NAGARI**

NO.	Nama Perangkat Daerah	Pengembalian Kuesioner/SAQ	Pengembangan Website	Mengumumkan Informasi Publik	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik	TOTAL NILAI	Keterangan
1	NAGARI LUNANG TIGA KEC. LUNANG	10	30	18.85	20	25	103.85	Sudah memilik SK PPID
2	NAGARI LUNANG BARAT KEC. LUNANG	10	30	15.16	9.77	21.43	86.36	Sudah memilik SK PPID
3	NAGARI PAINAN KEC. IV JURAI	10	30	17.21	13.02	14.29	84.52	Belum memiliki SK PPID
4	NAGARI LALANG PANJANG KEC. AIPURA	10	5	0.4	0.93	0	16.33	Belum memiliki website
5	NAGARI KOTO VIII PELANGAI KEC. RANAH PESISIR	10	0	0	0	0	10	Belum memiliki website
6	NAGARI SUNGAI TUNU KEC. RANAH PESISIR	10	0	0	0	0	10	Belum memiliki website

2. Hasil Verifikasi Website

HASIL PENILAIAN WEBSITE
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	Nama Perangkat Daerah	Alamat Website	Pengembangan Website	Mengumumkan Informasi Publik	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik	TOTAL NILAI
1	RSUD M. ZEIN PAINAN	http://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/	30	19.25	14.58	15	78.83
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/	30	13.22	15.25	20	78.47
3	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	http://dispersip.pesisirselatankab.go.id/	15	4.31	1.36	3.33	24
4	DINAS PERHUBUNGAN	http://dishub.pesisirselatankab.go.id/	25	4.3	3.39	1.67	34.36
5	DINAS PARIWISATA	http://disparpora.pesisirselatankab.go.id/	25	4.45	8.81	10	48.26
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	http://dispupr.pesisirselatankab.go.id/	15	8.33	1.01	5	29.34
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/	25	6.3	1.36	3.33	35.99
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	http://bpkd.pesisirselatankab.go.id/	15	4.86	1.69	1.67	23.22
9	DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	http://dispsda.pesisirselatankab.go.id/	25	7.76	4.75	10	47.51
10	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & PERKEBUNAN	http://distanhortbun.pesisirselatankab.go.id/	0	0	0	0	0
11	DINAS PMPPTSP	http://perizinan.pesisirselatankab.go.id/	25	9.63	0.34	0	34.97
12	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	http://kotoxitarusankec.pesisirselatankab.go.id/	20	6.6	1.36	1.67	29.63
13	DINAS PERIKANAN	http://dkp.pesisirselatankab.go.id/	15	5.46	2.37	1.67	24.5
14	DINAS PERKIMTAN	http://disperkimtan.pesisirselatankab.go.id/	30	11.49	3.05	5	49.54
15	KECAMATAN BAYANG UTARA	http://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/	20	4.89	2.37	5	32.26
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	http://bpbpd.pesisirselatankab.go.id/	20	10.63	3.73	1.67	36.03
17	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	http://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/	25	6.03	2.71	3.33	37.07
18	BADAN PENDAPATAN	http://bapenda.pesisirselatankab.go.id/	10	4.89	0	5	19.89

HASIL PENILAIAN WEBSITE
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
KATEGORI : NAGARI

NO.	Nama Perangkat Daerah	Alamat Website	Pengembangan Website	Mengumumkan Informasi Publik	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik	TOTAL NILAI
1	NAGARI LUNANG TIGA KEC. LUNANG	lunangtiga.nagari.pesisirselatankab.go.id	20	15.14	15.81	23.21	74.16
2	NAGARI LUNANG BARAT KEC. LUNANG	http://lunangbarat.nagari.pesisirselatankab.go.id/	20	14.75	9.77	21.43	65.95
3	NAGARI PAINAN KEC. IV JURAI	http://painan.nagari.pesisirselatankab.go.id/	20	9.43	1.39	1.79	32.61
4	NAGARI LALANG PANJANG KEC. AIPURA		0	0	0	0	0
5	NAGARI KOTO VIII PELANGAI KEC. RANAH PESISIR		0	0	0	0	0
6	NAGARI SUNGAI TUNU KEC. RANAH PESISIR		0	0	0	0	0

PENILAIAN JUMLAH INFORMASI PUBLIK DAN BERITA YANG DIPUBLISH
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP TAHUN 2018	JUMLAH PUBLIKASI BERITA DI WEBSITE	TOTAL	BOBOT NILAI
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26	2	28	0
2	DINAS PERHUBUNGAN	118	0	118	5
3	DINAS PERIKANAN	61	1	62	0
4	KECAMATAN BAYANG UTARA	32	1	33	0
5	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	66	1	67	0
6	RSUD M. ZEIN PAINAN	319	7	326	15
7	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	105	27	132	5
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	109	4	113	5
9	DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	100	0	100	5
10	DINAS PMPPTSP	72	16	88	0
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	115	1	116	5
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	103	2	105	5
13	DINAS PARIWISATA	111	4	115	5
14	DINAS PERKIMTAN	36	6	42	0
15	BADAN PENDAPATAN	24	0	24	0
16	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & PERKEBUN	107	1	108	5
17	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	12	22	0
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	210	4	214	10

Catatan : Setiap 100 Dokumen informasi publik yang dipublish mendapatkan bobot 5, berlaku kelipatannya

Dari hasil Penilaian Isian/Jawaban SAQ, verifikasi website serta jumlah informasi publik dan berita yang dipublish oleh masing-masing Badan Publik, maka di dapat 5 (lima) Badan Publik untuk masing-masing kategori dengan nilai tertinggi :

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

1. RSUD M. Zein Painan, dengan total nilai : 182.66
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan total nilai : 176.94
3. Dinas Perhubungan, dengan total nilai : 109.6
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan total nilai : 136.84
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dengan total nilai : 104.38

B. KATEGORI : NAGARI

1. Nagari Lunang Tiga, dengan total nilai : 178.01
2. Nagari Lunang Barat, dengan total nilai : 152.31
3. Nagari Lalang Panjang, dengan total nilai : 48.94
4. Nagari Painan, dengan total nilai : 117.13

3. Hasil Penilaian Visitasi Badan Publik

**PENILAIAN VISITASI BADAN PUBLIK
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
KATEGORI : PERANGKAT DAERAH**

NO.	Nama Perangkat Daerah	Alamat Website	Pengembangan Website	Mengumumkan Informasi Publik	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik	TOTAL NILAI
1	RSUD M. ZEIN PAINAN	http://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/	25	12.64	12.2	21.67	71.51
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/	25	8.91	7.8	18.33	60.04
3	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	http://dispersip.pesisirselatankab.go.id/	25	6.61	5.08	15.87	52.56
4	DINAS PERHUBUNGAN	http://dishub.pesisirselatankab.go.id/	20	8	6.1	11.67	45.77
5	DINAS PARIWISATA	http://disparpora.pesisirselatankab.go.id/	20	9.48	3.73	13.33	46.54

**PENILAIAN VISITASI BADAN PUBLIK
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
KATEGORI : NAGARI**

NO.	Nama Perangkat Daerah	Alamat Website	Pengembangan Website	Mengumumkan Informasi Publik	Menyediakan Informasi Publik	Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik	TOTAL NILAI
1	NAGARI LUNANG TIGA KEC. LUNANG	lunangtiga.nagari.pesisirselatankab.go.id	20	14.11	14.58	23.21	71.9
2	NAGARI LUNANG BARAT KEC. LUNANG	http://lunangbarat.nagari.pesisirselatankab.go.id	20	11.48	12.09	17.86	61.43
3	NAGARI PAINAN KEC. IV JURAI	http://painan.nagari.pesisirselatankab.go.id/	15	10.24	7.9	14.29	47.43
4	NAGARI LALANG PANJANG KEC. AIPURA		20	4.91	6.05	10.72	41.68

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

a. Kategori : Perangkat Daerah

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKASI ISIAN/JAWABAN SAQ	VERIFIKASI WEBSITE	VISITASI	TOTAL NILAI
1	RSUD M. Zein Painan	26.65	23.65	28.60	78.90
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.54	23.54	24.02	74.10
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.20	7.20	25.90	43.30
4	Dinas Perhubungan	13.81	10.31	18.31	42.43
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13.81	14.48	12.56	40.85

b. Kategori : Nagari

NO.	NAMA NAGARI	VERIFIKASI ISIAN/JAWABAN SAQ	VERIFIKASI WEBSITE	VISITASI	TOTAL NILAI
1	Nagari Lunang Tiga	31.16	22.25	24.57	77.98
2	Nagari Lunang Barat	25.91	19.64	28.76	74.30
3	Nagari Painan	25.36	9.78	18.97	54.11
4	Nagari Lalang Panjang	4.90	0	16.67	21.57

Total Nilai di dapat akumulasi masing-masing instrument penilaian pada setiap alur kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Verifikasi SAQ, berbobot : 30%
2. Verifikasi Website, berbobot : 30%
3. Visitasi, berbobot : 40%

TEMUAN VERIFIKASI SAQ DAN EVALUASI SERTA REFLEKSI UNTUK PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN NAGARI

Hasil akhir dari kegiatan monitoring dan evaluasi pemeringkatan ini adalah berupa temuan – temuan yang diperoleh dari seluruh tahapan evaluasi. Temuan-temuan ini akan menjadi penentu berapa nilai, kualifikasi dan peringkat yang akan diperoleh masing-masing Badan Publik.

Secara keseluruhan, kualifikasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum optimal. Dari 75 rangkap SAQ yang dikirim, hanya 18 SAQ Perangkat Daerah dan 6 SAQ Nagari yang dikembalikan.

1. Temuan terkait indikator Pengumuman Informasi Publik

- Komitmen mengumumkan informasi belum optimal
Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website sejumlah Badan Publik. Misalnya, informasi terkait profil Badan Publik dan Pimpinannya. Misalnya, informasi terkait profil badan publik dan pimpinannya, informasi tentang kegiatan dan kinerja badan publik, regulasi, laporan pengaduan dan informasi pengadaan barang dan jasa. Jikapun ada, informasi yang ditampilkan terkesan hanya seadanya saja atau kurang dari indikator lengkap. Dengan kata lain, meskipun menu dalam laman website lengkap, konten informasi yang ditampilkan tidak lengkap, berbeda dan bahkan ada yang kosong sama sekali.

- Pengumuman Informasi Keuangan masih rendah
Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik yang paling minim ditampilkan di website badan publik.

2. Penyediaan Informasi Publik

- Penyediaan Informasi publik belum dilakukan disatu tempat
Selama proses visitasi lapangan, tim penilai menemukan banyak badan publik tidak menyediakan informasi di ruang pelayanan informasi. Sebagian besar dokumen yang harus disediakan berada dibawah penguasaan bidang/kantor atau lembaga lain. Sehingga pada saat diminta untuk menunjukkan dokumen terkait, petugas PPID harus mencari di tempat lain (dalam hal ini tim penilai memposisikan diri sebagai pemohon informasi). PPID membuang cukup banyak waktu untuk mencari dan menunjukkan dokumen/ informasi tersebut kepada tim penilai.
- Penyediaan informasi belum terlaksanan dengan baik
Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai. Hal ini beririsan dengan temuan pada huruf a. Sebagian informasi yang seharusnya disediakan oleh PPID ternyata belum tersedia. Selain itu, informasi/dokumen yang disediakan tidak sesuai dengan instrumen. Misalnya, ketika PPID diminta menunjukkan informasi tentang pedoman pengelolaan keuangan, informasi tersebut tidak dapat ditunjukkan karena sedang dibawah penguasaan bagian keuangan, bahkan ada yang menunjukkan draf anggaran.

3. Pelayanan Informasi Publik

Secara umum pelayanan informasi belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan temuan-temuan sebagai berikut :

- Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan, belum menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan informasi prosedur pelayanan informasi publik.
- Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi yang terkait dengan jumlah pemohon yang dilayani, anggaran, sarana dan prasarana, dan kegiatan PPID lainnya.

4. Tingkat partisipasi dalam mengikuti pemeringkatan hanya 32%

Pada Tahun pertama penyelenggaraan kegiatan ini, tingkat partisipasi hanya mencapai 32%. Dengan kata lain dari 75 Badan Publik yang harus dinilai, hanya 24 yang mengikuti proses evaluasi.

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MENGEMBALIKAN JAWABAN/ISIAN KUESIONER / TIDAK BERPARTISIPASI

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD

3	INSPEKTORAT DAERAH
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	DINAS KESEHATAN
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASY. & DESA, PENG. PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PANGAN
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
12	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
15	KECAMATAN BAYANG
16	KECAMATAN IV JURAI
17	KECAMATAN BATANG KAPAS
18	KECAMATAN SUTERA
19	KECAMATAN LENGAYANG
20	KECAMATAN RANAH PESISIR
21	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
22	KECAMATAN PANCUNG SOAL
23	KECAMATAN AIRPURA
24	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
25	KECAMATAN LUNANG
26	KECAMATAN SILAUt

II. PENGEMBANGAN/INOVASI TAHUN 2018

Dalam upaya penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai inovasi sebagai berikut :

1. Pengintegrasian website Perangkat Daerah dengan website PPID Utama sebagai sarana dalam mempublish dan mengumumkan informasi publik yang dikuasai Badan Publik. Integrasi merupakan suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dalam rangka mendukung manajemen informasi. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan Transparansi Informasi di Kabupaten Pesisir Selatan melalui integrasi data.
2. Melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah dan Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan satu-satu Kabupaten/Kota di Sumatera yang melakukan pemeringkatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan sebagai saran monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Public announcement speaker yang merupakan media informasi publik yang di tempat di kawasan publik/pantai cerocok painan. Ini bertujuan untuk memberikan informasi yang

berkaitan dengan informasi publik, program dan kegiatan pemerintahan daerah, informasi bencana alam serta informasi lain yang dianggap penting untuk disampaikan kepada masyarakat.

4. Membentuk PPID Nagari dalam upaya mewujudkan sistem layanan informasi nagari melalui pembangunan website nagari yang dikenal dengan Sistem Informasi Nagari (SINAR) sebanyak 121 Nagari. Dan target kami memfasilitasi pembangunan sistem informasi nagari sebanyak 182 nagari.

III. KENDALA

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Namun dengan adanya kendala tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada para PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat mengatasinya sehingga dapat menjadi lebih baik kedepannya serta menjadikan kendala dan kelemahan tersebut sebagai dasar untuk pengembangan dan inovasi.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

- a. Tidak semua Kepala Badan Publik mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik, dengan adanya Badan Publik yang belum membentuk PPID di instansi yang dipimpin.
- b. Peran PPID Pembantu belum optimal baik di Perangkat Daerah maupun di Nagari, hal ini dapat dilihat dari belum semua PPID Pembantu menunjuk petugas layanan/admin khusus PPID dan menyediakan desk layanan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.
- c. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kabupaten Pesisir Selatan sehingga proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal
- d. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT terutama penggunaan website sebagai sarana untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Perangkat Daerah dan Nagari dikarenakan terbatasnya personil yang berkompeten di bidang IT.
- e. Masih belum tersosialisasikannya keberadaan PPID kepada masyarakat sehingga fungsi PPID untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat belum berjalan optimal.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- b. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat meningkatkan pelayanan informasi publik dan mempercepat dalam merespon permohonan informasi publik serta meningkatkan kapasitas pengelola informasi baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu.

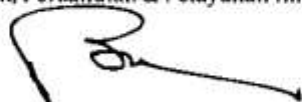
- c. Mengembangkan aplikasi PPID, permohonan informasi dan pengajuan keberatan untuk PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari)
- d. Melakukan sosialisasi untuk penguatan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID melalui Pemeringkatan PPID bagi Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memberikan penghargaan kepada PPID Terbaik dan memberikan hukuman berupa teguran dari Bupati Pesisir Selatan bagi PPID dengan tingkat pelayanan informasi publik paling rendah.

BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Tahun 2018 PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil meraih preatasi pada **Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik sebagai Peringkat I untuk kategori Kabupaten/Kota dan Peringkat III untuk Kategori Nagari (Nagari Lunang Tiga).**

Demikian Laporan ini disusun sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. ***"Dengan Keterbukaan Informasi Publik Kita Wujudkan Pemerintahan yang Transparan, Bersih dan Partisipati Menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju"***

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Statistik, Persandian & Pelayanan Informasi



Drs. PURWANDRI
Pembina (IV/a)
NIP. 19650613 199703 1 001

Painan, Desember 2018
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
Kasi Pelayanan e-Government



SILVIA PERMATA SARI S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

L A M P I R A N

DOKUMENTASI

1. Rapat Koordinasi PPID dengan Tema : “ Penguatan Tugas dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Bupati



2. Penanda Tangan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik Bagi Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik Tanggal 9 Juli 2018 bertempat di Halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan



3. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 9 Juli 2018

bertempat di Hannah Hotel Syariah Painan dengan Peserta PPID Pembantu dan Admin/Operator PPID masing-masing perangkat daerah.



Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi PPID Tanggal 9 Juli 2018



4. Rapat Koordinasi PPID tentang Evaluasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Operation Room Kantor Bupati.





5. Kunjungan/Visitasi Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Lunang Tiga, Nagari Sungai Gayo dan SMAN 1 Lunang tanggal 27 s/d 28 September 2018.

Visitasi Tim Penilai dari
Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Barat





Visitasi Badan Publik Tanggal 27 September 2018 ke :

1. Nagari Lunang Tiga
2. SMAN 1 Lunang

Visitasi Badan Publik Tanggal 28 September 2018 ke :

1. PPID Utama
2. Nagari Sungai Gayo



6. Pembekalan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bagi Perangkat Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 27 November 2018 bertempat di Hannah Hotel Syariah Painan.



Pembekalan Pemeringkatan dan Sosialisasi UU KIP Bagi Nagari Tanggal 27 November 2018



7. Kunjungan/Visitasi ke Perangkat Daerah dan Nagari yang masuk 5 (lima) besar dalam Rangka Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 s/d 6 Desember 2018.





Visitasi ke :

1. Nagari Painan
2. Nagari Lalang Panjang
3. Nagari Lunang Tiga
4. Nagari Lunang Barat

Visitasi ke :

1. RSUD M. Zein
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Arsip dan Pustaka
5. Disdukcapil





8. Peanugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Kyriad Bumiminang Hotel





Kabupaten Pesisir Selatan meraih prestasi pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik, sebagai berikut :

Kategori Kabupaten/Kota : Peringkat I (Kabupaten Pesisir Selatan)

Kategori Nagari : Peringkat III (Nagari Lunang Tiga)

Kategori KPU: Peringkat I (KPU Pesisir Selatan)

Kategori Bawaslu : Peringkat I (Bawaslu Pesisir Selatan)

9.

Bupati (pada saat apel gabungan). Yang diserahkan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan H.Hendrajoni, S.H, M.H dan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Arfitriati, S.Ag dan Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Adrian Tuswandi, SH.



Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Kategori Perangkat Daerah :

1. RSUD M.Zein Painan
2. Dinas DukCapil
3. Dinas Arsip dan Pustaka

Kategori Nagari :

1. Nagari Lunang Tiga
2. Nagari Lunang Barat
3. Nagari Painan

